Lampiran Memorandum No...

 Matriks Penjelasan Kelengkapan Dokumen Pendukung Pengembangan Kerja Sama

 Kategori Risiko Sedang

Bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP)

|  |
| --- |
| **Data Pemohon** |
| Nama Pemohon | : | PT ……………… |
| Jenis Permohonan | : | Permohonan Persetujuan Pengembangan Kerja Sama berupa ……………. |
| **Dokumen**  |
| Surat  | : 1. Surat No…………….. tanggal …………….. perihal: …………………..  |

| **No.** | **Persyaratan Dokumen** | **Dokumen[[1]](#footnote-1)** | **Penjelasan Dokumen** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ada** | **Tidak Ada** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **KELENGKAPAN DOKUMEN TERKAIT PENGEMBANGAN PRODUK DAN AKTIVITAS JASA SISTEM PEMBAYARAN** |
| **A. Aspek Kesiapan Operasional** |
|  | Surat rekomendasi bagi PJP/PIP yang memiliki otoritas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:1. Surat rekomendasi dari otoritas pengawas atas rencana kerja sama yang akan dilakukan apabila dipersyaratkan oleh otoritas dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. Surat pernyataan dari PJP/PIP bahwa otoritas pengawas tidak mensyaratkan persetujuan atas pengembangan kerja sama yang akan dilakukan; atau
3. Surat pernyataan bahwa PJP tidak berada dibawah pengawasan otoritas selain Bank Indonesia
 |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa surat. No………….. tanggal…… perihal: .................................(judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan bahwa:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
|  | Rekomendasi bagi PJP/PIP dari lembaga atau organ yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah atas rencana kerja sama berdasarkan prinsip syariah:1. Rekomendasi dari lembaga atau organ yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah atas rencana kerja sama berdasarkan prinsip syariah (apabila ada); atau
2. Surat pernyataan dari PJP/PIP bahwa PJP/PIP tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
 |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa surat. No………….. tanggal…… perihal: .................................(judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan bahwa:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
|  | Penjelasan mengenai model bisnis dan/atau alur transaksi secara lengkap dan jelas dari pengembangan kerja sama yang akan diselenggarakan. |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan mengenai:Penjelasan model bisnis dan/atau alur transaksi secara lengkap dan jelas dari pengembangan kerja sama yang akan diselenggarakan termasuk peran masing-masing pihak yaitu sbb:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
|  | Dokumen kesepakatan kerja sama antara PJP/PIP dengan pihak yang akan diajak bekerja sama, paling kurang mencakup:* 1. *Summary* konsep final kesepakatan kerja sama tertulis dengan pihak-pihak yang akan diajak bekerjasama, paling kurang memuat klausul tentang: a. pihak yang terlibat dalam kerja sama; b. ruang lingkup kerja sama; c. hak dan kewajiban masing-masing pihak; d. rencana pelaksanaan; e. jangka waktu kerja sama; dan f. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa.
	2. Bukti kesiapan perangkat hukum, seperti konsep final kesepakatan kerja sama tertulis dengan pihak yang akan diajak bekerjasama yang dituangkan dalam bahasa Indonesia. Konsep final perjanjian kerja sama paling kurang memuat klausul tentang: a. pihak yang terlibat dalam kerja sama; b. ruang lingkup kerja sama; c. hak dan kewajiban masing-masing pihak; d. rencana pelaksanaan; e. jangka waktu kerja sama; dan f. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa.
 |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan sbb:1. *Summary* konsep final perjanjian kerja sama tertulis dengan pihak-pihak yang akan diajak bekerjasama, meliputi:
	1. pihak yang terlibat dalam kerja sama yaitu:

………………………………………………..* 1. ruang lingkup kerja sama yaitu:

………………………………………………..* 1. hak dan kewajiban masing-masing pihak; yaitu:

…………………………………………………..* 1. rencana pelaksanaan kerja sama, yaitu:

……………………………………………………* 1. jangka waktu kerja sama, yaitu:

……………………………………………………* 1. pilihan hukum dan penyelesaian sengketa, yaitu:

…………………………………………………….1. Bukti konsep final kesepakatan kerja sama tertulis dengan pihak yang akan diajak bekerjasama yang dituangkan dalam bahasa Indonesia.

........................................................................................................................................................................................................................................ |
|  | Khusus kerja sama dengan penyelenggara penunjang dilengkapi dengan:1. hasil penilaian PJP/PIP terhadap kemampuan penyelenggara penunjang dalam memberikan layanan yang akan dikerjasamakan, antara lain memastikan terpenuhinya aspek-aspek: (i) legalitas dan profil perusahaan Penyelenggara Penunjang; (ii) kinerja keuangan dan operasional Penyelenggara Penunjang; (iii) pemenuhan prinsip keamanan dan keandalan sistem informasi dan infrastruktur oleh Penyelenggara Penunjang; (iv) kemampuan atau kompetensi Penyelenggara Penunjang; dan (v) pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
2. Dokumen bukti yang menunjukkan PJP/PIP bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran, mencakup paling kurang:
3. mekanisme pemantauan PJP/PIP terhadap kinerja Penyelenggara Penunjang;
4. penerapan manajemen risiko oleh Penyelenggara Penunjang antara lain berupa pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala, penguatan *business continuity plan*, dan mitigasi terhadap *single point of failure*. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Penyelenggara Penunjang sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga pengakhiran kerja sama.
5. tersedianya akses ke Penyelenggara Penunjang bagi Bank Indonesia, mencakup antara lain akses terhadap data atau informasi, sistem dan infrastruktur, dan sumber daya manusia.
6. Dokumen tambahan untuk memperkuat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menunjukan kemampuan Penyelenggara Penunjang dalam memberikan layanan, antara lain:
7. Dokumen yang menunjukkan profil penyelenggara penunjang paling kurang memuat: 1) ringkasan profil perusahaan, termasuk rekam jejak perusahaan dalam penyelenggaraan SP; 2) struktur organisasi; 3) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, yang bertanggung jawab dalam pengembangan produk/aktivitas yang akan dilakukan yang memuat informasi nama, jabatan, alamat, nomor kartu identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 4) struktur permodalan.
8. Informasi mengenai kemampuan atau kompetensi SDM penyelenggara penunjang dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan dikerjasamakan, paling kurang mencakup: a. bukti kecukupan sumber daya manusia; b. rekam jejak pengurus dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan yang akan dikerjasamakan
9. Laporan keuangan perusahaan Penyelenggara Penunjang untuk periode 1 tahun terakhir

Khusus kerja sama dengan penyelenggara penunjang yang melakukan penerusan pembayaran dari PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa, agar disertai dengan bukti pemenuhan hal-hal sebagai berikut (mengacu pada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan SRO, apabila sudah berlaku):1. memiliki perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban terkait pengelolaan dana secara jelas, termasuk tingkat layanan (service level agreement) penerusan pembayaran dari Penyelenggara Penunjang kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa;
2. penampungan dana tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau ketentuan SRO;
3. dana yang akan diteruskan tidak ditempatkan pada aset yang memiliki risiko, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban Penyelenggara Penunjang.
 |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan sbb:1. Hasil penilaian terhadap kemampuan penyelenggara penunjang dalam memberikan layanan yang akan dikerjasamakan, yang mencakup:
	1. Aspek legalitas dan profil perusahaan Penyelenggara Penunjang, yaitu:

…………………………………………………………………* 1. Aspek kinerja keuangan dan operasional Penyelenggara Penunjang, yaitu:

………………………………………………………………….* 1. Aspek pemenuhan prinsip keamanan dan keandalan sistem informasi dan infrastruktur oleh Penyelenggara Penunjang yaitu:

…………………………………………………………………….* 1. Aspek kemampuan atau kompetensi Penyelenggara Penunjang, yaitu:

…………………………………………………………….* 1. Aspek pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

……………………………………………………………..1. Dalam dokumen.............................telah dinyatakan bahwa PJP/PIP bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran, yang paling kurang mencakup:
2. mekanisme pemantauan PJP terhadap kinerja Penyelenggara Penunjang, yaitu:

……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................1. penerapan manajemen risiko oleh Penyelenggara Penunjang yang mencakup antara lain berupa pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala, penguatan *business continuity plan*, dan mitigasi terhadap *single point of failure*. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Penyelenggara Penunjang sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga pengakhiran kerja sama, yaitu:

……………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................1. tersedianya akses ke Penyelenggara Penunjang bagi Bank Indonesia, mencakup antara lain akses terhadap data atau informasi, sistem dan infrastruktur, dan sumber daya manusia.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. Dokumen tambahan untuk memperkuat hasil penilaian kemampuan memberikan layanan oleh Penyelenggara Penunjang, yaitu:
2. Profil penyelenggara penunjang sbb:
3. ringkasan profil perusahaan, termasuk rekam jejak perusahaan dalam penyelenggaraan SP:

……………………………………………………………….1. struktur organisasi:

 ………………………………………………………………1. susunan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Direksi yang bertanggung jawab dalam pengembangan produk/aktivitas akan dilakukan, dengan informasi meliputi:
2. informasi nama:
3. jabatan:
4. alamat:
5. nomor kartu identitas diri:
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
7. struktur permodalan:

……………………………………………………………….. 1. Informasi mengenai kemampuan atau kompetensi SDM penyelenggara penunjang meliputi:
	1. bukti kecukupan sumber daya manusia yaitu:

……………………………………………………………..................* 1. rekam jejak pengurus dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan yang akan dikerjasamakan, yaitu:

……………………………………………………………...................…………………………………………………………..1. Laporan keuangan tahun ……………. (untuk 1 tahun terakhir) dengan informasi sebagai berikut:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Khusus kerja sama dengan penyelenggara penunjang yang melakukan penerusan pembayaran dari PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa, bukti pemenuhan hal-hal sebagai berikut (mengacu pada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan SRO, apabila sudah berlaku):1. memiliki perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban terkait pengelolaan dana secara jelas, termasuk tingkat layanan (service level agreement) penerusan pembayaran dari Penyelenggara Penunjang kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa
2. penampungan dana tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau ketentuan SRO,
3. dana yang akan diteruskan tidak ditempatkan pada aset yang memiliki risiko, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban Penyelenggara Penunjang,

tercantum pada/berupa:……………………………………………………. |
| **B. Aspek Keamanan dan Keandalan Sistem** |
| 1 | Hasil penilaian PJP/PIP terhadap keamanan dan keandalan sistem dari pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup:1. Dokumen yang menunjukkan hasil penilaian PJP/PIP terhadap keamanan dan keandalan sistem dari pihak yang akan diajak bekerja sama
2. Dokumen yang menunjukkan hasil penilaian PJP/PIP mengenai dampak kerja sama terhadap perubahan prosedur pengendalian pengamanan, sistem pengelolaan fraud serta prosedur, mekanisme, dan infrastruktur penanganan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity*) dan keadaan darurat (*disaster recovery*);
3. Hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian
 |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan:1. Berdasarkan hasil penilaian PJP/PIP, keamanan dan keandalan sistem dari pihak yang diajak bekerja sama adalah sebagai berikut:

………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................1. Berdasarkan hasil penilaian PJP/PIP, dampak kerja sama terhadap perubahan prosedur pengendalian pengamanan, sistem pengelolaan fraud serta prosedur, mekanisme, dan infrastruktur penanganan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity*) dan keadaan darurat (*disaster recovery*) adalah sbb:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. Hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian

.................................................................................................................... |
| **C. Aspek Penerapan Manajemen Risiko** |
| 1 | Hasil penilaian PJP/PIP terhadap eksposur risiko yang timbul serta mitigasi risiko, antara lain risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko setelmen; termasuk *fraud* dan APU PPT |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan hal-hal sbb:Hasil penilaian mengenai eksposur risiko sehubungan dengan pengembangan kerja sama yang dilakukan serta mitigasi risikonya, yaitu (cantumkan risiko yang terkait):1. Risiko operasional terdiri atas ...................................................................................................................dengan mitigasi risiko ............................................................................................................
2. Risiko likuiditas terdiri atas.............................................................................................................dengan mitigasi risiko ......................................................................................................
3. Risiko setelmen terdiri atas ...................................................................................................................dengan mitigasi risiko ......................................................................................................
4. Risiko *fraud* terdiri atas ...................................................................................................................dengan mitigasi risiko ......................................................................................................
5. Risiko APU/PPT terdiri atas ...................................................................................................................dengan mitigasi risiko ......................................................................................................
6. Risiko lain (sebutkan) terdiri atas ...................................................................................................................dengan mitigasi risiko. .....................................................................................................
 |
| 2 | Hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Berdasarkan hasil asesmen diatas, terdapat/tidak terdapat penyesuaian terhadap prosedur dan mekanisme yang telah ada, yaitu:…………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................. |
| 3 | Hasil penilaian PJP/PIP antara lain terhadap prosedur pemantauan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme serta prosedur dan mekanisme pengelolaan *fraud* |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan hal-hal sbb:1. Prosedur operasional dalam rangka pemantauan APU/PPT yaitu:

………………………………………………………………………………..1. Prosedur dan mekanisme pengelolaan *fraud* akan dilakukan sbb:

……………………………………………………………………………………Lainnya (jelaskan).................................................................................................................................................................................................................................................... |
| **D. Aspek Perlindungan Konsumen** |
| 1 | Dokumen yang menunjukkan kewajiban pihak yang diajak bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen |  |  | **Dokumen yang disampaikan:**Lampiran berupa Dokumen: .................................(No dan judul dokumen)**Penjelasan atas dokumen:** Dokumen yang disampaikan di atas menginformasikan hal-hal sbb:Kewajiban terhadap pihak yang diajak bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah telah tercantum pada…………………............... yang menyebutkan sbb:…………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................ |

 **Jakarta,**

1. Agar dicentang (V) sesuai dokumen yang disampaikan (Ada/Tidak Ada) \*) Agar dicoret yang tidak sesuai [↑](#footnote-ref-1)